

CIPS

Center for Indonesian
Policy Studies

Reformasi Kebijakan Beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia

oleh Hizkia Respatiadi dan Hana Nabila

www.cips-indonesia.org

**Reformasi Kebijakan Beras:
Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia**

Oleh:

Hizkia Respatiadi

Hana Nabila

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia

Agustus 2017



Ringkasan Eksekutif

Tiga perubahan kebijakan dapat membuat harga beras lebih terjangkau bagi warga miskin. Pertama, pemerintah sebaiknya menghapus kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Kebijakan ini belum berhasil menurunkan harga beras, yang melonjak ke rata-rata Rp 10.646,56 per kilogram, atau 12,07% di atas HET antara September 2016 hingga Mei 2017. Harga beras di Indonesia mencapai sekitar dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga internasional pada Mei 2017. Selain itu, kebijakan HET secara tidak adil menempatkan tanggung jawab untuk menurunkan harga beras pada para pedagang eceran, padahal laba terbesarnya justru dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi, dan pedagang grosir.

Kedua, pemerintah sebaiknya menghapus Pasal 9 ayat 1.b pada Permendag Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang memberikan Badan Urusan Logistik (Bulog) hak untuk memonopoli importasi beras. Terkait dengan ini, pemerintah seyogyanya memfokuskan diri sebagai regulator guna memastikan keadilan dan transparansi dalam proses impor tersebut. Bulog tidak dapat menentukan waktu impor berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar dikarenakan badan tersebut harus mempertimbangkan proses birokrasi dan pertimbangan politis pemerintah. Akibatnya, Bulog menghabiskan lebih banyak dana untuk impor beras daripada yang seharusnya, sehingga memboroskan anggaran hingga Rp 303 milyar (22,78 juta dolar Amerika Serikat [AS]) antara tahun 2010 hingga 2017. Oleh karena itu, importasi dan distribusi beras sebaiknya dibuka sebagai peluang usaha bagi perusahaan-perusahaan swasta yang memenuhi syarat. Hal ini penting mengingat rantai distribusi beras impor lebih pendek dibandingkan beras lokal, sehingga beras impor dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan para konsumen.

Ketiga, Bulog sebaiknya memusatkan perhatian pada tugasnya dalam penanggulangan bencana, terutama dalam menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan beras ke daerah-daerah yang terdampak oleh bencana maupun situasi darurat lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.234 situasi bencana sepanjang paruh pertama tahun 2017, termasuk banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gempa bumi. Sejumlah bencana alam diperkirakan akan terus melanda Indonesia, sehingga upaya penanggulangan bencana selayaknya menjadi prioritas penting.

Situasi Terkini

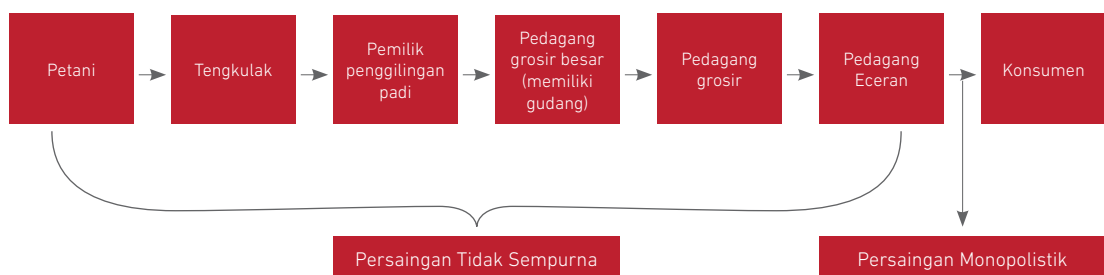
“ Harga beras di Indonesia hampir dua kali lipat lebih mahal dari pada harga acuan Bank Dunia pada periode yang sama.”

Beras adalah makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Konsumsi beras nasional setiap tahunnya diperkirakan mencapai 45,7 juta ton (OECD dan FAO, 2015). Menurut laporan gabungan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis tahun 2015, konsumsi beras tahunan per kapita Indonesia tercatat mencapai 163 kilogram, lebih tinggi dibandingkan Thailand (142,5 kilogram), Tiongkok (76,4 kilogram), dan India (73,4 kilogram). Konsumsi yang tinggi ini berarti bahwa harga beras memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan penduduk Indonesia, khususnya mereka yang berpendapatan rendah.

Terdapat sekitar 28 juta penduduk miskin di Indonesia, dengan pendapatan rata-rata bulanan sebesar Rp 300.000 (22,64 dolar AS) (Bank Dunia, 2015), dan rata-rata harga beras pada awal Mei 2017 mencapai Rp 10.600 (0,8 dolar AS) per kilogram (Kementerian Perdagangan, 2017). Harga ini hampir dua kali lipat lebih mahal daripada harga acuan Bank Dunia pada periode yang sama (Bank Dunia, 2017).¹ Hal ini menunjukkan bahwa seorang penduduk miskin dengan konsumsi beras rata-rata tahunan dan membeli beras dengan harga rata-rata akan menghabiskan sekitar 47,9% pendapatan bulanan mereka untuk beras.²

Pemerintah Indonesia berargumentasi bahwa harga beras yang tinggi merupakan akibat dari panjangnya rantai distribusi untuk beras produksi dalam negeri (Ariyanti, 2016; Jefriando, 2016). Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, beras lokal dari petani melalui lima pelaku distribusi yang berbeda sebelum sampai ke konsumen.

Gambar 1
Tingkat Distribusi Beras Lokal di Indonesia



Sumber: KPPU (2016)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (2016) melaporkan bahwa sistem distribusi beras lokal di Indonesia menghadapi persaingan tidak sempurna dan monopolistik sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

¹ Harga acuan Bank Dunia pada Mei 2017 adalah Rp5.609,28 (0,42 dolar AS) per kilogram (Bank Dunia, 2017), dan berdasarkan pada harga beras di Thailand.

² Perkiraan ini tidak sepenuhnya berlaku pada penduduk miskin yang menerima beras bersubsidi lewat program Raskin/Rastra atau voucher pangan dari pemerintah, maupun penduduk miskin yang bekerja sebagai petani padi, mengingat mereka dapat memenuhi setidaknya sebagian dari kebutuhan beras dari sawah mereka.

Di tingkat petani, tengkulak, dan pemilik penggilingan padi, persaingan tidak sempurna merujuk pada situasi di mana pihak pembeli (contohnya para tengkulak) saling berkolusi dan bersepakat untuk membeli beras dari pihak penjual (contohnya para petani) dengan harga yang mereka tentukan sendiri, dan bukan menggunakan harga pasar. Di tingkat pedagang grosir, persaingan tidak sempurna merujuk pada persaingan oligopolistik, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mengendalikan proses distribusi (Bhinadi, 2016) dan oleh karenanya turut mengendalikan harga (Pradana, 2015).

KPPU menyatakan bahwa ada persaingan monopolistik di tingkat pedagang eceran dan konsumen meskipun terdapat sejumlah pedagang eceran di pasaran. Hal ini disebabkan hanya sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan sama sekali terhadap harga yang dikenakan oleh para pedagang eceran di wilayah yang sama, yang umumnya terjadi akibat kompetisi oligopolistik di antara para pedagang grosir sebagaimana disebutkan sebelumnya (KPPU, 2016).

Kebijakan yang Sudah Ada

A. Kebijakan dalam negeri

Secara nasional, pemerintah memberlakukan harga pembelian terendah di tingkat petani sejak tahun 2002 sebagai bagian dari kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Badan Ketahanan Pangan, 2013). Pada tahun 2016, pemerintah juga menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tahun 2017 (selanjutnya disebut Permendag 27/2017).

Pemerintah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mempertahankan harga terendah dengan membeli beras dari petani sesuai dengan HPP yang telah ditentukan. Bulog diperkenankan untuk menyimpan beras yang dibelinya sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP),³ dan kemudian mendistribusikannya sebagai bagian dari program beras bersubsidi (Raskin/Rastra) untuk rumah tangga prasejahtera yang telah terdaftar, atau sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana di daerah-daerah yang terdampak.

Untuk menerapkan HET di tingkat konsumen, Bulog melaksanakan kegiatan pemantauan pasar yang disebut Operasi Pasar (Kementerian Perdagangan, 2016). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pedagang eceran menjual berasnya kepada para konsumen pada atau di bawah HET, dan apabila melanggar, izin berdagang mereka akan dicabut (Masa, 2017). Menurut pejabat dari Kementerian Perdagangan, kebijakan ini berfungsi sebagai indikator untuk menentukan kapan pemerintah perlu mengintervensi pasar (Sagala dan Adri, wawancara pribadi, 21 Maret 2017).

Pemerintah berupaya untuk mengendalikan harga pasar baik pada tingkat petani maupun konsumen menggunakan HPP dan HET. Peraturan di masa lalu maupun saat ini terkait HPP dan HET dapat dilihat di Tabel 1.

³ Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berfungsi untuk menjaga persediaan beras di tingkat yang "aman", dan digunakan ketika terjadi kelangkaan beras akibat kegagalan di pasar atau bencana alam. Jumlah beras yang dijadikan cadangan bervariasi dan tergantung pada situasi pasar.

Tabel 1
Kebijakan Pemerintah untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di Tingkat Petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Tingkat Konsumen untuk Beras, 2002-2015

No.	Peraturan	HPP di Tingkat Petani (Rp per kg)			HET di Tingkat Konsumen (Rp per kg)
		Gabah Kering Panen (GKP)*	Gabah Kering Giling (GKG)**	Beras	
1.	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 09/2002	1.230	1.725	2.790	-
2.	Inpres Nomor 02/2005	1.330	1.765	2.790	-
3.	Inpres Nomor 13/2005	1.730	2.250	3.550	-
4.	Inpres Nomor 03/2007	2.000	2.575	4.000	-
5.	Inpres Nomor 01/2008	2.240	2.800	4.300	-
6.	Inpres Nomor 08/2008	2.400	2.440	4.600	-
7.	Inpres Nomor 07/2009	2.640	3.300	5.060	-
8.	Inpres Nomor 03/2012	3.300	4.150	6.600	-
9.	Inpres Nomor 05/2015	3.700	4.600	7.300	-
10.	Permendag 63/2016	3.700	4.600	7.300	9.500
11.	Permendag 27/2017	3.700	4.600	7.300	9.500

* = Merupakan bulir padi berkulit dengan kadar air maksimum 25% dan bahan asing maksimum 10%

** = Merupakan bulir padi berkulit dengan kadar air maksimum 14% dan bahan asing maksimum 3%

Sumber:

1. Badan Ketahanan Pangan (2012)
2. Permendag 63/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen
3. Permendag 27/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen

B. Kebijakan luar negeri

Pemerintah membatasi impor beras dengan tujuan untuk menyokong pendapatan para petani dan sekaligus menurunkan harga beras agar tetap terjangkau oleh para konsumen (Kantor Presiden RI, 2017). Pemerintah berharap agar kebijakan HET dapat menjaga harga beras tetap terjangkau (Budiyanti, 2017), dan agar pembatasan impor beras dapat memastikan bahwa beras lokal tetap mendominasi pasar, sehingga pada akhirnya menguntungkan para petani lokal (Bulog, 2012; Hakim, 2016; The Jakarta Post, 2017).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (selanjutnya disebut Permendag 103/2015) pasal 9 ayat 1.b menyatakan bahwa Bulog adalah satu-satunya perusahaan yang diizinkan untuk mengimpor beras ke Indonesia. Hal ini terkait dengan tugas Bulog dalam menstabilkan harga beras, berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana, dan mengentaskan kemiskinan. Sebelum mengimpor, Bulog harus memperoleh izin resmi dari Kementerian Perdagangan, yang mana izin ini hanya dapat dikeluarkan melalui pertemuan koordinasi di tingkat menteri di antara sejumlah kementerian yang menangani bidang ekonomi (Permendag 103/2015 Pasal 9 ayat

2 dan Pasal 10 ayat 3). Selain itu, izin ini bahkan juga bergantung pada perintah langsung dari Presiden (Faqih, 2015; Melani, 2015). Permendag 103/2015 memang memperbolehkan perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor beras, tapi hanya untuk beberapa jenis beras tertentu untuk keperluan industri (Pasal 12)⁴ dan kebutuhan konsumsi khusus (Pasal 18).⁵ Akibatnya, terjadi monopoli yang disahkan pemerintah dalam importasi beras, yang mana waktu impornya juga ditentukan oleh pemerintah.

“
Akibatnya, terjadi monopoli yang disahkan pemerintah dalam importasi beras, yang mana waktu impornya juga ditentukan oleh pemerintah.
”

Kebijakan ini dapat ditelusuri hingga ke akhir tahun 1960an, ketika Bulog ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan cadangan pangan dan melakukan stabilisasi harga beras oleh Orde Baru yang baru didirikan oleh mantan Presiden Soeharto. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia memperluas kewenangan Bulog di luar beras, yaitu mencakup distribusi gula, tepung terigu, kacang kedelai, dan pakan ternak. Setelah terjadinya krisis moneter di Asia pada tahun 1998, lembaga ini kembali hanya menjalankan distribusi beras saja (Bulog, 2012b). Pada periode ini, hak monopoli impor beras Bulog dihapuskan sebagai bagian dari paket reformasi struktural Dana Moneter Internasional (IMF) (Patunru & Basri, 2012). Pada tahun 2012, hak monopoli tersebut kembali diserahkan pemerintah kepada Bulog.

Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan kewenangan kepada Bulog untuk menstabilkan harga dan pasokan sejumlah bahan pokok strategis, termasuk beras, daging sapi, kacang kedelai, jagung, minyak goreng, tepung, daging ayam, bawang merah, dan lada (Bulog 2015; Kementerian Perdagangan, 2015).

Pada tahun 2016, lewat Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, Presiden memperkuat kewenangan ini dengan menunjuk Bulog untuk menstabilkan pasokan dan harga beras, jagung, dan kacang kedelai. Sementara itu, dengan adanya mandat tambahan dari pertemuan koordinasi setingkat menteri di bidang ekonomi, peraturan ini juga memungkinkan Bulog memperoleh hak untuk menstabilkan pasokan dan harga berbagai bahan pangan lainnya, seperti gula, minyak goreng, tepung, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

⁴ Termasuk beras pecah dan beras ketan pecah. Jenis-jenis beras ini umumnya digunakan di industri tepung beras.

⁵ Termasuk beras ketan utuh, dan sejumlah jenis beras seperti Japonica, Basmati, dan Thai Hom Mali. Masing-masing varietas ini hanya diperbolehkan mengandung butiran pecah maksimum 5%, yang dianggap sebagai kualitas kelas-satu menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 6128-2008).

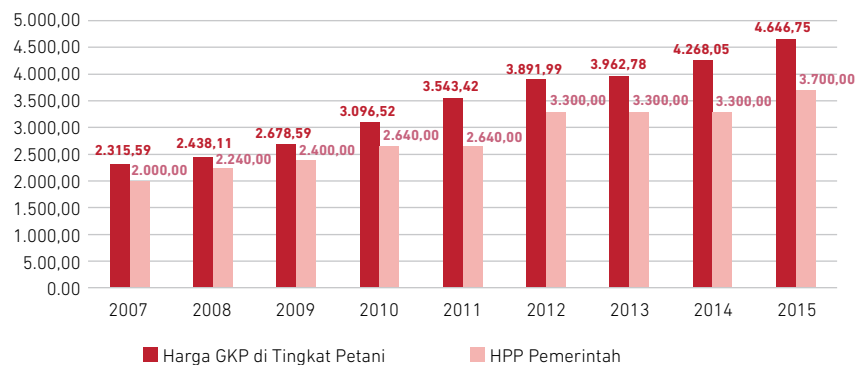
Analisis

Mempertimbangkan tingginya konsumsi beras di Indonesia dan kesulitan yang ditimbulkan oleh tingginya harga beras bagi 28 juta penduduk miskin di Indonesia, perlu dilakukan analisis terhadap efektifitas upaya-upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan memberlakukan kebijakan pembatasan perdagangan.

A. Kebijakan HPP dan HET

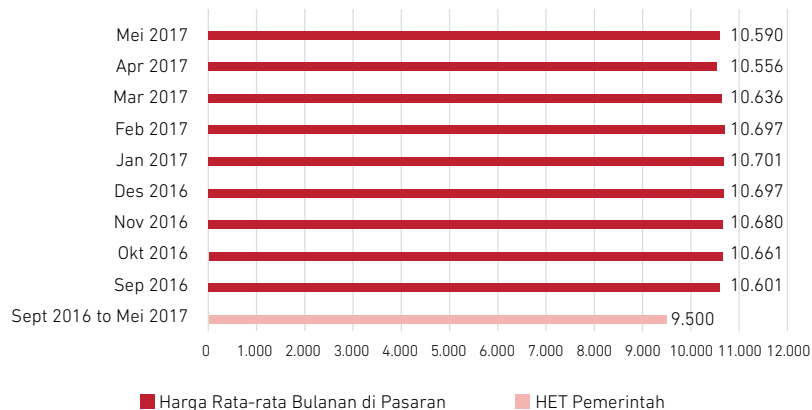
Kebijakan HPP dan HET membuahkan hasil yang bervariasi. Dari tahun 2007 hingga tahun 2015, harga rata-rata tahunan beras di tingkat petani berhasil mencapai 20,89% di atas HPP (Gambar 2). Namun, harga rata-rata bulanan di tingkat konsumen dari September 2016 hingga Mei 2017 tercatat mencapai 12,07% lebih mahal daripada HET (Gambar 3).

Gambar 2
Harga Rata-rata Tahunan Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Petani dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), 2007-2015



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2016) dan Badan Ketahanan Pangan (2013)

Gambar 3
Harga Beras Rata-rata Bulanan di Pasar Konsumen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah



Sumber diolah dari:

1. Kementerian Perdagangan (2017)
2. Permendag 63/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen
3. Permendag 27/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen

Para pedagang eceran beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta mencemaskan bahwa mereka tidak akan mampu memperoleh laba bila mereka menjual beras seharga HET, karena harga beras yang harus mereka bayarkan kepada para pedagang grosir pun sudah lebih tinggi dibandingkan HET (Hasil wawancara, 15-16 Juni 2017). Apabila para pedagang eceran dipaksa untuk menjual beras senilai HET, terdapat risiko bahwa mereka akan mencampur beras berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah (seperti beras bersubsidi dari Bulog) untuk menghindari kerugian.

“Apabila para pedagang eceran dipaksa untuk menjual beras senilai HET, terdapat risiko bahwa mereka akan mencampur beras berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah untuk menghindari kerugian.”

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melaporkan bahwa para anggotanya tidak dapat mematuhi kebijakan HET karena mereka harus menanggung berbagai biaya tambahan dalam bertransaksi dengan pedagang grosir (Medianti, 2017). Biaya-biaya tambahan tersebut, seperti biaya transportasi dan upah tenaga kerja, justru tidak diperhitungkan oleh pemerintah pada saat mereka menetapkan HET. Selain itu, para pedagang eceran di pasar tradisional harus melunasi transaksinya dengan para pedagang grosir di muka, dan sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, para pedagang grosir bisa saja menjual beras mereka ke para pedagang eceran di atas HET. Dalam situasi ini, para pedagang eceran di pasar tradisional harus menjual beras mereka di atas HET, dan jika tidak, mereka terancam merugi dan bahkan gulung tikar. Sebaliknya, pihak ritel modern (seperti minimarket dan supermarket) dapat melunasi transaksi mereka dengan para pedagang grosir di kemudian hari. Hal ini membuat mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik pada saat bernegosiasi dengan para pedagang grosir tersebut, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengikuti HET (M. Maulana, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2017).

Masalah yang dihadapi para pedagang eceran di pasar tradisional menggambarkan bagaimana HET dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menentukan harga ekuilibrium, di mana jumlah yang diminta konsumen seimbang dengan jumlah yang ditawarkan produsen (Morton, 2001). Intervensi pasar yang dilakukan pemerintah melalui HET telah mendistorsi permintaan dan penawaran di pasar, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kelangkaan beras. Teori ekonomi memprediksi bahwa hal inilah yang akan terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang bersifat intervensi pasar seperti HET (Investopedia, 2003; Vogel, 2004).

“Intervensi pemerintah telah mendistorsi permintaan dan penawaran di pasar, sehingga justru meningkatkan kemungkinan terjadinya kelangkaan beras.”

Pengalaman Venezuela baru-baru ini (Gupta, 2015; Wilson, 2016; Wu, 2016) menggambarkan betapa seriusnya risiko yang harus dihadapi jika para pedagang kecil dipaksa untuk menjual produk-produk mereka pada harga yang ditetapkan pemerintah. Sejak tahun 2003, pemerintah Venezuela memberlakukan pengendalian harga untuk barang-barang pokok, termasuk makanan, alat-alat rumah tangga, dan produk-produk kebersihan. Alih-alih menurunkan harga, kebijakan ini justru memicu aktivitas pasar gelap dan meningkatkan kelangkaan barang dari rata-rata 5% pada tahun 2003 menjadi 22,2% pada tahun 2013, dan pada tahun 2016 kelangkaan tersebut bahkan mencapai 41,3% (Wu, 2016). Kelangkaan ini berkontribusi pada meningkat tajamnya

harga tepung jagung yang merupakan bahan makanan pokok di Venezuela. Harga produk tersebut meningkat sepuluh kali lipat dari 19 bolívar Venezuela (1,9 dolar AS) per kilogram pada Februari 2015 ke 190 bolívar Venezuela (19 dolar AS) pada Mei 2016, sebagaimana dinyatakan oleh Badan Nasional untuk Pengendalian Harga dan Biaya (SUNDECOP) Venezuela, dan dilaporkan oleh berbagai media (Charner & Clarke, 2016; DataMark Brazil, 2016; The Straits Times, 2016). Harga tepung jagung di pasar gelap bahkan lebih tinggi lagi hingga mencapai 1.500 bolívar Venezuela (150 dolar AS) per kilogram (Wilson, 2016).

B. Sistem distribusi beras di Indonesia

Para pedagang eceran melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengikuti HET yang disyaratkan pemerintah, karena harga yang mereka bayarkan kepada pedagang grosir pun sudah lebih tinggi daripada HET. Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa rantai distribusi yang panjang merupakan sumber masalah yang menjadi penyebab utama tingginya harga beras di Indonesia. Untuk membahas argumen ini, perlu dilakukan analisis terhadap pihak mana yang paling diuntungkan dalam sistem distribusi yang ada saat ini.

Beras lokal

“Bahkan karena inefisiensinya saluran distribusi beras, sering terjadi rentang harga yang sangat jauh antara harga beras di tingkat produsen...dengan harga beras di tingkat konsumen.”

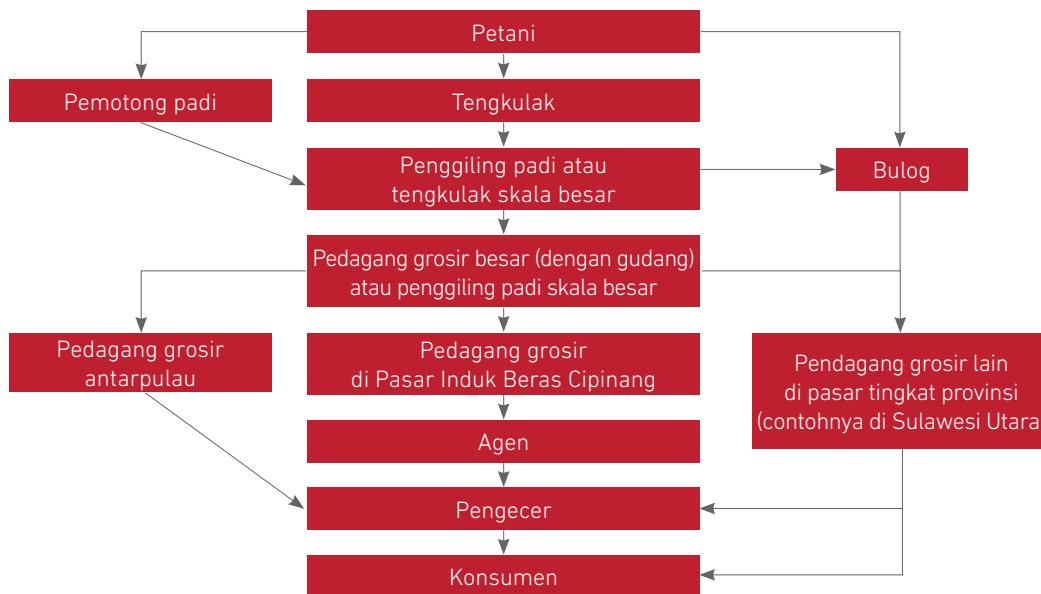
– Mahardika (2013) –⁶

Beras lokal dari petani melalui empat hingga enam pelaku distribusi sebelum mencapai konsumen. Pertama, petani menjual padi yang telah dipanen kepada tengkulak atau kepada pemotong padi, yang akan mengeringkan padi dan menjualnya kepada pemilik penggilingan. Setelah padi digiling menjadi beras, pemilik penggilingan menjualnya kepada pedagang grosir berskala besar yang memiliki gudang penyimpanan. Mereka kemudian menjual beras tersebut kepada pedagang grosir yang berskala lebih kecil di pasar tingkat provinsi (seperti Pasar Induk Beras Cipinang di Provinsi DKI Jakarta), atau kepada pedagang grosir antar pulau. Para pedagang grosir tersebut kemudian menjual berasnya kepada para pedagang eceran, atau dalam kasus Pasar Induk Beras Cipinang, beras tersebut harus melalui agen penjual sebelum sampai ke tangan pedagang eceran. Setelah itu, barulah konsumen dapat membeli beras tersebut di pasar. Proses distribusi ini tertera pada Gambar 4.

⁶ Mahardika, T.K.S. (2013). *Kajian Distribusi Beras di Wilayah DKI Jakarta Melalui Pasar Induk Beras Cipinang*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, hal. 4

“Dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi, atau pedagang grosir.”

Gambar 4
Rantai Pasok Distribusi Beras Lokal di Indonesia



Sumber diolah dari:

1. Kamar Dagang Indonesia, sebagaimana dikutip dalam Tambunan (2008)
2. Mardianto, Supriatna, dan Agustin (2005), sebagaimana dikutip dalam Ariwibowo (2013)
3. Mahardika (2013)

Dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi, atau pedagang grosir (Tabel 2). Di Pulau Jawa, margin laba ini berkisar antara 60% s/d 80% per kilogram. Sebaliknya, margin laba yang diperoleh para pedagang eceran hanya sebesar 1,8% s/d 9,1% per kilogram. Situasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak-pihak yang menikmati laba terbesar dalam sistem distribusi justru terjadi ketika beras belum sampai di pasar eceran, termasuk pasar tradisional. Dalam situasi ini, kebijakan HET menjadi tidak efektif karena hanya memaksa para pedagang eceran untuk menurunkan harga berasnya, padahal bukan merekalah yang membuat harganya menjadi tinggi.

Harga tinggi yang dikenakan di sepanjang rantai pasok dan panjangnya rantai pasok itu sendiri turut mengurangi proporsi dari harga yang diterima oleh para petani padi atau yang biasanya disebut sebagai *farmer's share*⁷ (Azzaino 1981, sebagaimana dikutip dalam Mahardika, 2013). Terdapat empat pelaku distribusi beras di provinsi Jawa Timur, dan lima pelaku di Jawa Barat. DKI Jakarta juga memiliki lima pelaku distribusi, di mana sekitar 71% pasokan beras datang

⁷ *Farmer's share* petani dihitung dengan membagi harga jual di tingkat petani dengan harga jual di tingkat pedagang eceran. Semakin panjang proses distribusi, maka *farmer's share* petani pun akan semakin kecil.

dari petani di Jawa Barat, dan sisanya berasal dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. *Farmer's share* di Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah-daerah pemasok beras untuk DKI Jakarta hanya mencapai antara 38% hingga 45%.

Di Sulawesi Utara, di mana hanya terdapat tiga pelaku distribusi beras, proporsi dari harga yang diterima petani mencapai 73,68%. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh skala kepemilikan lahan di provinsi ini, di mana 120.899 atau 47,7% dari pemilik lahan pertanian adalah petani skala menengah dan besar⁸ (Badan Pusat Statistik, 2013b). Dibandingkan dengan petani berskala kecil, petani berskala menengah dan besar tidak terlalu membutuhkan jasa para tengkulak untuk memperoleh modal pada saat musim tanam. Alhasil, ketika musim panen, mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam bernegosiasi dengan para pemilik penggilingan mengenai harga jual padinya. Sayangnya, hampir 56% petani di Indonesia adalah petani skala kecil, sehingga sistem distribusi beras yang sekarang ada merugikan sebagian besar petani (Badan Pusat Statistik, 2013a).⁹

Tabel 2 menggambarkan secara lebih rinci mengenai margin laba dari sistem distribusi beras lokal dan *farmer's share* yang diterima para petani di provinsi-provinsi yang telah disebutkan di atas.

⁸ Setiap petani skala menengah mengendalikan antara 1,0 hingga 1,99 hektar lahan, dan setiap petani skala besar mengendalikan lebih dari 2 hektar (Ambarwati, Harahap, Sadoko, & White, 2016).

⁹ Dari 26.135.469 rumah tangga petani di Indonesia, 14.622.396 (55,94%) di antaranya mengendalikan hanya sebidang kecil tanah berukuran kurang dari 0,5 hektar.

Tabel 2
Profit Margin of Rice Distribution in the Provinces of West Java, East Java, North Sulawesi, and DKI Jakarta

Tingkat Distribusi	Jawa Barat*				Jawa Timur**				Sulawesi Utara***				DKI Jakarta****			
	Harga Jual (Rp/kg)	Biaya (Rp/kg)	Margin Laba+		Harga Jual (Rp/kg)	Biaya (Rp/kg)	Margin Laba		Harga Jual (Rp/kg)	Biaya (Rp/kg)	Margin Laba		Harga Jual (Rp/kg)	Biaya (Rp/kg)	Margin Laba	
			(Rp/kg)	(%)			(Rp/kg)	(%)			(Rp/kg)	(%)			(Rp/kg)	(%)
Petani	3.700				3.147				7.000				4.110			
Tengkulak	3.800	63,5	36,5	0,9%	3.720	380	193	6,13%								
Pemilik penggilingan padi/ tengkulak skala besar	4.000	67,5	132,5	3,5%	7.115	405	2.290	80,4%	8.167	67	1.100	15,7%	7.318	260	2.948	78%
Pedagang grosir (dengan gudang)/ Pemilik penggilingan berskala besar	8.700	2.255	2.445	61,1%	7.393	150	128	1,7%	8.500	117	217	2,6%	7.681	125	238	3,2%
Pedagang grosir	9.400	82,5	617,5	7,1%									7.985	125	179	2,3%
Agen	9.700	100	200	2,1%	7.650	120	137	1,8%	9.500	229	771	9,1%	8.546	385	176	2,2%
Pedagang Eceran													8.950	55	349	4,1%
Farmer's share petani	38,14%				41,14%				73,68%				45,92%			

Catatan:

- Tabel ini berfokus pada para pelaku distribusi beras, dan tidak menunjukkan biaya dan margin laba para petani (produsen).
- Beras di DKI Jakarta sebagian besar datang dari Pasar Induk Beras Cipinang. Sekitar 71% pasokan pasar ini bersumber dari petani di Jawa Barat, dan sisanya berasal dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
- Beras di tingkat petani adalah Gabah Kering Panen (GKP).
- Beras di tingkat pedagang eceran adalah beras tanpa kemasan yang dijual di pasar tradisional.
- Biaya termasuk pengeluaran untuk pengeringan, penggilingan, transportasi, dan pengantaran beras.

+ = Margin laba adalah proporsi laba dari harga jual beras untuk setiap pelaku distribusi. Laba dihitung dengan mengurangi harga penjualan dengan harga beli dan biaya, sedangkan margin laba dihitung dengan membagi laba dengan harga jual.

Sumber:

- * = Saragih (2014)
- ** = Ariwibowo (2013)
- *** = Ruauw (2015)
- **** = Mahardika (2013)

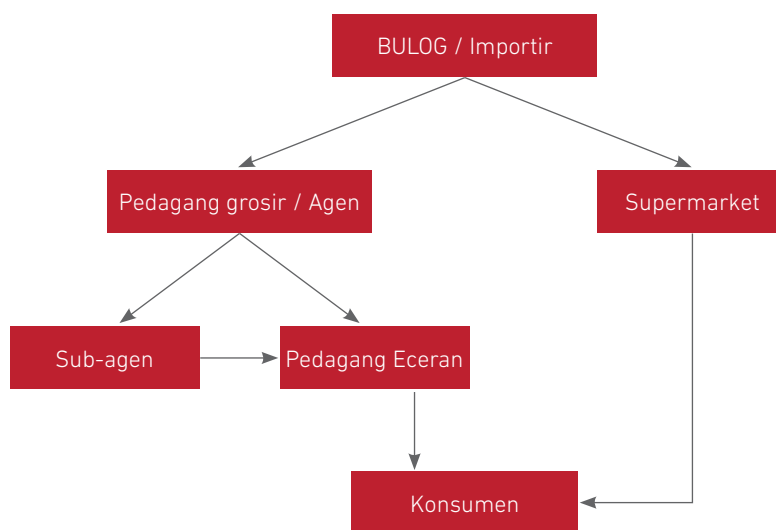
“Sistem distribusi yang pendek ini dimungkinkan karena beras impor adalah produk yang telah diproses dan siap dimasak.”

Beras Impor

Dibandingkan beras lokal, beras impor memiliki jalur distribusi yang lebih pendek. Ketika beras lokal harus melalui empat hingga enam pelaku distribusi (Gambar 4), beras impor hanya melalui paling banyak tiga pelaku distribusi hingga sampai di tangan konsumen (Gambar 5). Dari importir, beras dijual kepada pedagang grosir/agen atau supermarket. Dari sana, beras dijual kepada sub-agen lalu kemudian dijual lagi kepada pedagang eceran, atau bisa juga langsung dari pedagang grosir kepada pedagang eceran. Setelahnya, konsumen sudah dapat membeli beras melalui pedagang eceran atau supermarket. Sistem distribusi yang pendek ini dimungkinkan karena beras impor adalah produk yang telah diproses dan siap dimasak, serta tidak memerlukan peran para pemotong padi, tengkulak, maupun pemilik penggilingan padi.

Meskipun belum tersedia data yang solid untuk menganalisis margin laba dari setiap pelaku distribusi beras impor, pendeknya sistem distribusi beras impor menyediakan peluang yang lebih sedikit bagi para pelaku distribusi untuk mengambil keuntungan dari sistem yang ada. Oleh karenanya, menyediakan akses yang lebih baik untuk beras impor dapat memungkinkan konsumen untuk membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Gambar 5
Rantai Pasok Distribusi Beras Impor di Indonesia



Sumber diolah dari:

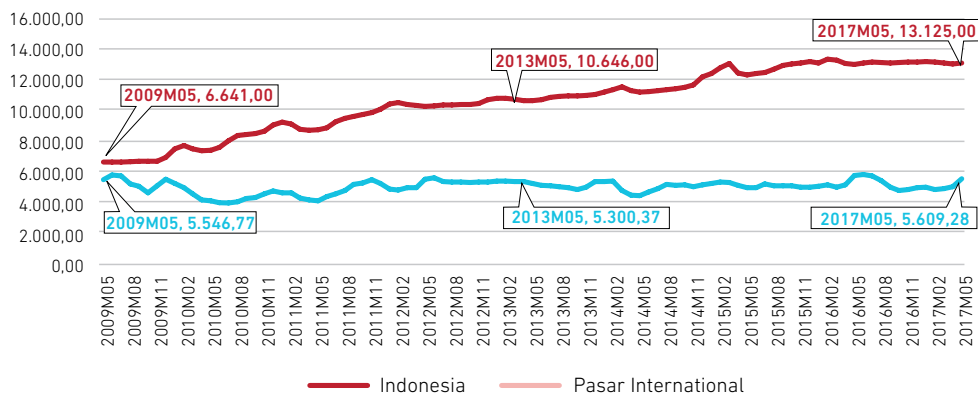
1. Badan Pusat Statistik (2009), sebagaimana dikutip dalam Surjasa, Gumbira-Sa'id, Arifin, Sukardi, & Jie (2013)
2. Kitano, Ariga, & Shimato (1999)

C. Harga beras di Indonesia dan pasar internasional

Sejak bulan Mei 2009 hingga Mei 2017, harga beras di Indonesia memiliki trayektori yang berbeda dibandingkan dengan harga beras di pasar internasional (Gambar 6). Pada bulan Mei 2009, keduanya masih sebanding di angka Rp 6.641 per kilogram (Indonesia) dan Rp 5.546,77 per kilogram (internasional). Pada Mei 2013, harga beras Indonesia meningkat sekitar 60,3% ke Rp 10.646 per kilogram, sementara harga di pasar internasional menurun sebesar 4,4% ke

Rp 5.300,37 per kilogram. Per Mei 2017, harga beras di Indonesia bahkan meningkat semakin tinggi hingga mencapai Rp 13.125 per kilogram, atau hampir dua kali lipat lebih mahal daripada harganya di Mei 2009. Sebaliknya, harga pasar internasional meningkat hanya sebesar 1,12% ke Rp 5.609,28 per kilogram, kurang dari separuh harga beras di Indonesia.

Gambar 6
The Trend of Rice Prices in Indonesia and in International Market



Sumber diolah dari Badan Pusat Statistik (2009-2017), Bank Dunia (2009-2017), dan X-rates.com (2017)

Hubungan antara harga beras di Indonesia dengan di pasar internasional pada jangka pendek berbeda dengan pada jangka panjang. Pada jangka pendek, perubahan harga sebesar 10% di pasar internasional diikuti oleh 1,09% perubahan harga ke arah yang sama di Indonesia. Pada jangka panjang, perubahan harga di pasar internasional tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap harga beras di Indonesia, sehingga harga beras di Indonesia semakin menjauh dari harga beras di pasar internasional. Keadaan ini membuat harga beras di Indonesia mengalami diskoneksi dari tren harga beras di pasar internasional.¹⁰

“ Harga beras di Indonesia semakin menjauh dan terdiskoneksi dari harga beras di pasar internasional. ”

D. Bulog berada dalam posisi tidak menguntungkan

Di saat beras impor menjadi alternatif untuk menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen, Bulog sebagai importir tunggal justru tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Waktu terbaik untuk mengimpor suatu produk adalah ketika harga internasionalnya berada dalam posisi rendah. Sayangnya, Bulog tidak bisa mengimpor hanya berdasarkan kondisi pasar, namun harus mengikuti pertimbangan politik dan prosedur birokratis pemerintah. Sesuai Permendag 103/2015 Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 3, sebelum dapat mengimpor beras, Bulog harus menunggu instruksi dari Presiden atau pertemuan koordinasi setingkat menteri.

Sebagai akibatnya, importasi beras oleh Bulog menjadi kegiatan yang berbiaya tinggi. Sejak Januari 2010 hingga Maret 2017, Bulog seringkali mengimpor beras dalam jumlah besar ketika

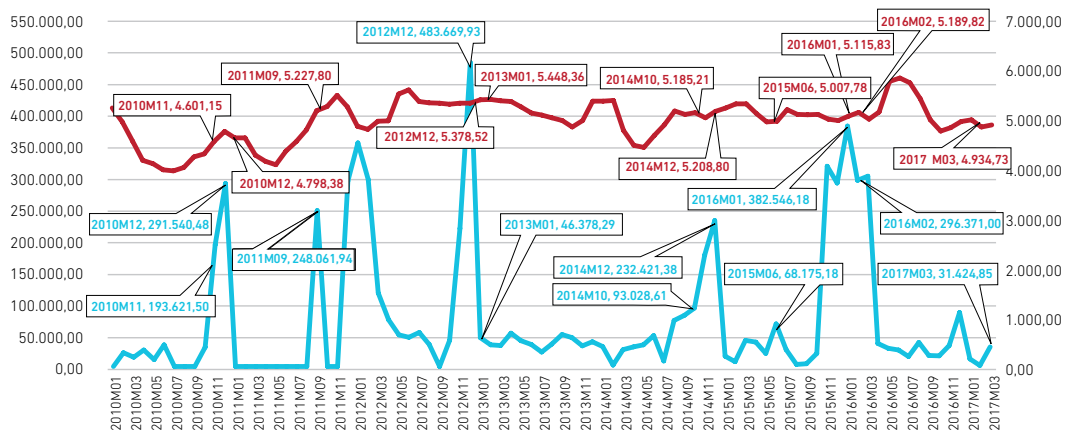
¹⁰ Perhitungan ini dijelaskan secara lebih terperinci di bagian Lampiran.

harga beras internasional lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini terjadi pada tahun 2010 (November dan Desember), 2011 (September), 2012 (Desember), 2013 (Januari), 2014 (Oktober dan Desember), 2015 (Juni), 2016 (Januari dan Februari), dan 2017 (Maret), sebagaimana terlihat pada Gambar 7. Bulog dapat menghemat lebih dari Rp 303 milyar (Tabel 3) atau sekitar 22,78 juta dolar AS jika saja impor beras dilakukan setidaknya satu bulan sebelumnya.

“Bulog tidak bisa mengimpor hanya berdasarkan kondisi pasar, namun harus mengikuti pertimbangan politik dan prosedur birokratis pemerintah.”

Gambar 7

Tren Impor Beras oleh Bulog dan Harga Beras Internasional, Januari 2010-Maret 2017



Sumber disusun dari:

1. Badan Pusat Statistik (2010-2017)
2. Bank Dunia (2010-2017)
3. x-rates.com (2017)

Tabel 3
Perkiraan Harga dan Estimasi Jumlah yang Seharusnya Dapat Dihemat dari Impor Beras Bulog,
November 2010 s/d Maret 2017

Tahun	Bulan	Pembelian Riil oleh Bulog			Harga Internasional Bulan Sebelumnya (Rp/kg)	Estimasi Biaya (Juta rupiah)	Estimasi Penghematan (Juta rupiah)
		Jumlah (ton)	Harga Internasional (Rp/kg)	Estimasi Biaya (Juta rupiah)*			
2010	November	193.621,50	4.601,15	890.882	4.338,44	840.015	50.866
	Desember	291.540,48	4.798,38	1.398.922	4.601,15	1.341.421	57.501
2011	September	248.061,94	5.227,80	1.296.818	4.825,92	1.197.127	99.691
2012	Desember	483.669,93	5.378,52	2.601.428	5.378,40	2.601.370	58
2013	Januari	46.378,29	5.448,36	252.686	5.378,52	249.447	3.239
2014	Oktober	93.028,61	5.185,21	482.373	5.148,75	478.981	3.392
	Desember	232.421,38	5.208,80	1.210.636	5.081,26	1.180.993	29.643
2015	Juni	68.175,17	5.007,78	341.406	4.998,25	340.757	650
2016	Januari	382.546,18	5.115,83	1.957.041	5.023,94	1.921.889	35.152
	Februari	296.371,00	5.189,82	1.538.112	5.115,83	1.516.184	21.928
2017	Maret	31.424,85	4.934,73	155.073	4.893,76	153.786	1.287
TOTAL				12.125.378	TOTAL	11.821.970	303.408

Catatan:

* = Kami tidak menggunakan perhitungan biaya, asuransi dan angkut (CIF) dari Badan Pusat Statistik karena fluktuasi antarperiode-nya yang terlalu tinggi, sehingga membuat hasil perhitungannya meragukan. Kami memperkirakan biaya impor berdasarkan jumlah yang diimpor dan harga beras internasional sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia.

Sumber diolah dari:

1. Badan Pusat Statistik Indonesia (2010-2017)
2. Bank Dunia (2010 - 2017)
3. x-rates.com (2017)

Tingginya harga yang dibayarkan Bulog untuk mengimpor beras membahayakan kondisi finansial lembaga tersebut.¹¹ Sejak awal Januari 2010 hingga akhir Desember 2015, hutang Bulog bertambah 74%, dari Rp 12,7 milyar menjadi lebih dari Rp 22,1 milyar (Tabel 4). Jumlah ini mencakup lebih dari tiga perempat aktivitya secara keseluruhan, di mana jumlah hutang tersebut tercatat hampir empat kali lipat lebih besar daripada jumlah modalnya. Situasi keuangan Bulog berada dalam risiko tinggi¹² yang mana menandakan ketidakmampuannya untuk memperoleh penghasilan dari usahanya dalam jumlah yang mencukupi tanpa mengandalkan anggaran pemerintah.

“ Situasi keuangan Bulog berada dalam risiko tinggi yang mana menandakan ketidakmampuannya untuk memperoleh penghasilan dari usahanya dalam jumlah yang mencukupi tanpa mengandalkan anggaran pemerintah. ”

¹¹ Keuangan Bulog meliputi aktiva, hutang, dan modal. Aktiva Bulog termasuk aktiva lancar (seperti uang kas dan setara kas, piutang dagang, dan barang persediaan) dan aktiva tetap (seperti properti dan kendaraan bermotor). Sebagian besar (83,25%) hutang Bulog merupakan pinjaman bank jangka pendek. Modal Bulog termasuk modal pemerintah dan modal dari anak perusahaan Bulog (Bulog, 2011-2015).

¹² Rasio hutang-ke-modal (*D/E ratio*) yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah mendanai pertumbuhannya dengan hutang secara agresif (Investopedia, 2016). Karena aktivitas usaha Bulog ditentukan secara ketat oleh pemerintah, nilai hutang Bulog berpotensi melebihi returnnya, sehingga menempatkannya pada risiko tinggi.

Tabel 4
Laporan Keuangan Bulog, Januari 2010-Desember 2015

Tanggal	Aktiva (Rp)	Kewajiban/Hutang (Rp)	Modal (Rp)	Rasio Hutang-terhadap-Aktiva	Rasio Hutang-terhadap-Modal
1 Jan 2010	15.339.520.170.928	12.728.776.536.863	2.610.743.634.065	82,98%	487,55%
31 Dec 2010	14.981.238.491.019	10.991.177.954.333	3.990.060.536.686	73,37%	275,46%
31 Dec 2011	18.672.029.209.476	13.745.427.793.835	4.926.601.415.641	73,62%	279,00%
31 Dec 2012	26.839.682.400.613	22.286.427.567.471	4.553.254.833.142	83,04%	489,46%
31 Dec 2013	25.891.624.271.796	21.675.128.996.912	4.216.495.274.884	83,71%	514,06%
31 Dec 2014	20.465.725.129.222	16.708.138.425.138	3.757.586.704.084	81,64%	444,65%
31 Dec 2015	29.831.584.489.092	22.142.745.777.902	7.688.838.711.191	74,23%	287,99%
Rata-rata	21.717.343.451.735	17.182.546.150.351	4.534.797.301.385	79,12%	378,90%

Sumber: Bulog (2011 - 2015)

Sementara itu, terdapat sejumlah perusahaan swasta – yang dapat mencakup usaha kecil dan menengah (UKM) – yang mampu mengimpor beras, termasuk beras reguler yang umumnya dikonsumsi masyarakat sebagai makanan pokok. Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan izin impor bagi 13 perusahaan swasta untuk mengimpor beras untuk keperluan industri (Agus, 2014; Handoyo dan Santosa, 2014; Mohamad, 2014) dan bagi 40 perusahaan swasta untuk mengimpor beras untuk kebutuhan diet khusus (Herlinda, 2014; JituNews.com, 2014; KabarBisnis.com, 2014). Situasi ini menunjukkan adanya perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengimpor beras reguler bagi para konsumen, jika saja pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukannya.

Rekomendasi

Kebijakan HET yang diterapkan lewat Permendag 27/2017 tidak mampu menurunkan harga beras bagi konsumen. Harga beras di Indonesia justru hampir dua kali lebih mahal dibandingkan beras Thailand yang digunakan Bank Dunia sebagai harga acuan internasional. Bulog adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk mengimpor beras untuk konsumsi masyarakat umum, sebagaimana yang diatur dalam Permendag 103/2015 Pasal 9 ayat 1.b. Namun importasi beras yang dilakukannya berdasarkan arahan pemerintah justru menimbulkan pemborosan anggaran negara dikarenakan pemerintah kerap mengarahkan Bulog untuk mengimpor beras ketika harga internasional telah naik.

Tiga rekomendasi di bawah ini dapat memperbaiki situasi tersebut:

A. Menghapuskan Permendag 27/2017 mengenai HET

Pemerintah sebaiknya menghapuskan kebijakan HET untuk beras dan memanfaatkan perdagangan internasional untuk menurunkan harga beras di tingkat konsumen. Kebijakan HET telah terbukti tidak efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh harga rata-rata beras di pasaran sejak September 2016 hingga Mei 2017 yang mencapai Rp10.646,56 per kilogram atau 12,07% lebih mahal daripada HET. Pada Mei 2017, harga beras di Indonesia mencapai sekitar dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga beras di pasar internasional.

Kebijakan HET juga menempatkan tanggung jawab untuk menurunkan harga beras pada para pedagang eceran, termasuk para pedagang kecil di pasar tradisional. Hal ini tidaklah adil, karena para pedagang eceran ini mendapatkan margin laba yang jauh lebih kecil dibandingkan sejumlah pelaku distribusi lainnya, termasuk para tengkulak, pemilik penggilingan padi, dan pedagang grosir.

“Pemerintah sebaiknya menghapuskan kebijakan HET untuk beras dan memanfaatkan perdagangan internasional untuk menurunkan harga beras di tingkat konsumen.”

B. Menghapuskan Permendag 103/2015 Pasal 9 ayat 1.b dan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta yang memenuhi syarat untuk dapat mengimpor beras

Pemerintah sebaiknya menghapuskan Pasal 9 ayat 1.b, yang memberikan monopoli impor beras pada Bulog. Sektor swasta sebaiknya diperbolehkan untuk mengimpor beras yang tidak hanya untuk keperluan industri dan kebutuhan diet khusus saja, namun juga beras reguler yang umumnya dikonsumsi sebagai makanan pokok. Pendeknya jalur distribusi untuk beras impor akan menjadi alternatif bagi permasalahan rantai distribusi beras lokal. Hal yang lebih penting adalah Indonesia akan lebih terintegrasi dengan pasar beras internasional dengan harganya yang lebih murah, sehingga para penduduk berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan beras mereka dengan harga yang lebih terjangkau.

Bulog tidak berada dalam posisi sebagai pengimpor beras yang efektif karena perusahaan ini bergantung pada pertimbangan politik dan prosedur birokratis pemerintah. Bulog menghabiskan lebih banyak anggaran untuk mengimpor beras daripada yang seharusnya, dan kondisi keuangannya pun memburuk. Mempertahankan Bulog sebagai importir tunggal berisiko semakin memboroskan anggaran negara dan bahkan dapat memicu kelangkaan beras apabila Bulog mengalami kehabisan dana dalam kegiatan pengadaannya.

“Sektor swasta sebaiknya diperbolehkan untuk mengimpor beras reguler yang umumnya dikonsumsi sebagai makanan pokok.”

Oleh karenanya, importasi beras harus dibuka sebagai peluang usaha bagi perusahaan-perusahaan swasta yang memenuhi syarat. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan kemampuan mereka dalam membaca situasi pasar beras baik di Indonesia maupun pasar internasional, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan importasi beras. Sementara itu bagi pemerintah, ketimbang berupaya mengendalikan impor secara langsung, pemerintah sebaiknya berfokus pada perannya sebagai regulator dengan menentukan kriteria, melakukan verifikasi informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut terkait kualifikasi mereka, dan memastikan kompetisi yang berdasarkan atas azas keadilan dan transparansi di antara perusahaan-perusahaan tersebut.

C. Bulog sebaiknya hanya berpartisipasi dalam pendistribusian beras dalam situasi darurat

Mengingat terbatasnya kemampuan Bulog untuk mengimpor beras secara efisien, perusahaan ini sebaiknya memusatkan perhatiannya pada upaya penanggulangan bencana, termasuk menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan beras dalam situasi darurat seperti bencana alam. Pada tahun 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadinya 1.681 bencana yang merenggut 259 jiwa dan membuat lebih dari 1,2 juta orang kehilangan tempat tinggalnya (2015). Selama kejadian tersebut, Bulog mendistribusikan hanya 37,08% (9.271 kilogram) beras dari total 25.000 kilogram cadangan beras yang dialokasikannya untuk area-area yang terdampak (Bulog, 2015).

Pada paruh pertama tahun 2017, tercatat ada 1.234 bencana di seluruh Indonesia, termasuk banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gempa bumi (BNPB, 2017). BNPB memprediksi bahwa bencana-bencana ini akan sering terjadi lagi di masa yang akan datang (Natalyn & Nadlir, 2017), dan karenanya, Bulog harus meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi dampak terhadap pasokan beras bagi daerah-daerah yang terkena bencana.

“Bulog sebaiknya memusatkan perhatiannya pada upaya penanggulangan bencana, termasuk menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan beras dalam situasi darurat seperti bencana alam.”

”

Referensi:

- Agus, R. (2014, 13 Juni). Impor Beras: Kemendag Tunjuk 13 Importir Produsen. Diakses 9 Agustus 2017, dari <http://industri.bisnis.com/read/20140613/12/235727/impor-beras-kemendag-tunjuk-13-importir-produsen>
- Ambarwati, A., Harahap, R. A., Sadoko, I., & White, B. (2016). Land tenure and agrarian structure in regions of small-scale food production [Kepemilikan lahan dan struktur pertanian dalam wilayah produsen pangan skala-kecil]. Dalam J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Land & Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty [Tanah dan Pembangunan di Indonesia: Mencari Kedaulatan Rakyat]*.
- Ariwibowo, A. (2013). *Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ariyanti, F. (2016, 1 Februari). Ini Penyebab Harga Bahan Pangan di RI Mahal. Diakses 8 Juni 2017, dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2425928/ini-penyebab-harga-bahan-pangan-di-ri-mahal>
- Badan Ketahanan Pangan. (2013, 16 September). Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan 2002-2012. Diakses 9 Juni 2017, dari <http://bkp.pertanian.go.id/berita-198-kebijakan-stabilisasi-harga-pangan-20022012.html>
- Bhinadi, A. (2012). Struktur Pasar, Distribusi, dan Pembentukan Harga Beras. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 24–32.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2015). *Info Bencana Edisi Desember 2015*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2017). Data Dan Informasi Bencana Indonesia. Diakses 5 Juli 2017, dari <http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana/statistik>
- Budiyanti, E. (2017). Dampak Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Komoditas Gula, Minyak Goreng, dan Daging Beku. *Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, IX (08). Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-8-II-P3DI-April-2017-219.pdf
- Badan Pusat Logistik (Bulog). (2011). *Laporan Tahunan 2011 - 2015*.
- Badan Pusat Logistik (Bulog). (2012a). Impor Beras, Siapa Yang Diuntungkan. Diakses 3 Juli 2017, dari <http://www.bulog.co.id/berita/37/2164/10/11/2010/Impor-Beras,-Siapa-Yang-Diuntungkan.html>
- Badan Pusat Logistik (Bulog). (2012b). Sejarah Perum Bulog. Diakses 30 Mei 2017, dari <http://www.bulog.co.id/sejarah.php>
- Badan Pusat Logistik (Bulog). (2015). *Laporan Tahunan 2015 - Transformasi Menuju Kedaulatan Pangan*. Diakses dari http://www.bulog.co.id/dokumen/annual_report/ANNUAL_REPORT_BULOG_2015.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi - Mei 2009 s/d Mei 2017*.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri - Impor - Januari 2010 s/d Maret 2017*. Diakses dari https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Buletin-Statistik-Perdagangan-Luar-Negeri-Impor-Maret-2017---.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2013a). Laporan Hasil Sensus Pertanian Nasional 2013 (Pencacahan Lengkap).
- Badan Pusat Statistik. (2013b). Laporan Hasil Sensus Pertanian Sulawesi Utara (Pencacahan Lengkap) 2013. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Indonesia 2016*.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta. <https://doi.org/9199017>
- Bank Dunia. (2009). *The World Bank Commodities Price data (The Pink Sheet) - from May 2009 to May 2017 [Data Harga Komoditas Bank Dunia (Lembar Merah Muda) - dari Mei 2009 hingga Mei 2017]*. Diakses dari <http://www.worldbank.org/commodities>

- Bank Dunia. (2015). *Indonesia's Rising Divide - Executive Summary* [Meluasnya Ketimpangan di Indonesia - Ringkasan Eksekutif].
- Bank Dunia. (2017). *The World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)* [Data Harga Komoditas Bank Dunia (Lembar Merah Muda)].
- Bank Dunia. (2017). *World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)* [Data Harga Komoditas Bank Dunia (Lembar Merah Muda)].
- Charner, F., & Clarke, R. (2016, 2 Agustus). Venezuela: Where flour, pasta and milk can cost a month's pay [Venezuela: Di mana tepung, pasta dan susu bisa seharga satu bulan gaji] - CNN.com. Diakses 5 Juli 2017, dari <http://edition.cnn.com/2016/08/02/americas/venezuela-food-prices/index.html>
- DataMark Brazil. (2016, 24 Mei). Venezuela will increase by 900% price of cornflour [Venezuela akan menaikkan harga tepung jagung sebesar 900%] | Datamark. Diakses 5 Juli 2017, dari <http://www.datamark.com.br/en/news/2016/5/venezuela-will-increase-by-900-price-of-cornflour-204464/>
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing [Kointegrasi dan Koreksi Kesalahan: Representasi, Perkiraan, dan Pengujian]. *Econometrica* [Ekonometrika], 55(2), 251–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2307/1913236>
- Faqih, F. (2015, 22 September). JK wacanakan impor beras, mentan tunggu instruksi Presiden Jokowi | merdeka.com. Diakses 4 Agustus 2017, from <https://www.merdeka.com/uang/jk-wacanakan-impor-beras-mentan-tunggu-instruksi-presiden-jokowi.html>
- Gupta, G. (2015, 16 April). Price controls and scarcity force Venezuelans to turn to the black market for milk and toilet paper [Pengendalian harga dan kelangkaan memaksa warga Venezuela berpaling ke pasar gelap demi susu dan tisu toilet]. Diakses dari <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/apr/16/venezuela-economy-black-market-milk-and-toilet-paper>
- Hakim, L. (2016, 23 Maret). Kebijakan Proteksi Impor yang Salah Sasaran. Diakses 3 Juli 2017, dari <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/601-kebijakan-proteksi-impor-yang-salah-sasaran>
- Handoyo, & Santosa, U. A. (2014, 15 Juni). Kemdag izinkan impor beras khusus ke 13 perusahaan. Diakses 9 Agustus 2017, dari <http://nasional.kontan.co.id/news/kemdag-izinkan-impor-beras-khusus-ke-13-perusahaan>
- Herlinda, W. D. (2014, 11 Juni). 40 Importir Beras Telah Kantongi Status IT. Diakses 8 Agustus 2017, dari <http://industri.bisnis.com/read/20140611/12/235167/40-importir-beras-telah-kantongi-status-it>
- Investopedia. (2003, 21 November). Deadweight Loss [Kerugian Bobot Mati]. Diakses 4 Juli 2017, dari <http://www.investopedia.com/terms/d/deadweightloss.asp>
- Investopedia. (2016). Debt/Equity Ratio [Rasio Utang/Modal]. Diakses 3 Agustus 2017, dari <http://www.investopedia.com/terms/d/debtequityratio.asp>
- Jefriando, M. (2016, June 14). Rantai Distribusi Terlalu Panjang, "Biang Kerok" Harga Beras Mahal [Long Chain of Distribution Makes Rice Prices Expensive]. Retrieved June 8, 2017, from <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3131996/rantai-distribusi-terlalu-panjang-%27biang-kerok%27-harga-beras-mahal>
- JituNews.com. (2014, June 11). Kemendag Keluarkan Izin Impor Beras [Ministry of Trade issue permits to import rice]. Retrieved August 9, 2017, from <http://www.jitunews.com/read/2217/kemendag-keluarkan-izin-impor-beras>
- KabarBisnis.com. (2014, June 12). 40 Perusahaan resmi kantong izin impor beras [40 private companies receive permits to import rice]. Retrieved August 9, 2017, from <http://www.kabarbisnis.com/read/2848048/40-perusahaan-resmi-kantongi-izin-impor-beras>
- Kantor Presiden RI. (2017, 13 Juni). Negara Harus Hadir untuk Kesejahteraan Petani. Retrieved July 3, 2017, dari <http://presidenri.go.id/berita-aktual/negara-harus-hadir-untuk-kesejahteraan-petani.html>
- Kementerian Perdagangan. (2015). *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015*.

- Kementerian Perdagangan. (2016). *Laporan Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan*.
- Kementerian Perdagangan. (8 Mei 2017). Grafik Harga Kebutuhan Pokok Nasional. Diakses 9 Mei 2017, dari <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/charts/national-price-chart>
- Kitano, N., Ariga, H., & Shimato, H. (1999). Current Situation of Rice Distribution System in Indonesia - Executive Summary [Situasi Terkini Sistem Distribusi Beras di Indonesia - Ringkasan Eksekutif]. Japan Bank for International Cooperation [Bank Kerjasama Internasional Jepang]. Diakses dari https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICI-Studies/jica-ri/publication/archives/jbic/report/paper/pdf/rp05_e.pdf
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2016). *Struktur Industri dan Rantai Distribusi Komoditas*.
- M. Maulana. (2017, 25 Mei). Personal interview with the Secretary General of the Indonesian Traditional Market Retailers Association (APPSI) [Wawancara pribadi dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia].
- Mahardika, T. K. S. (2013). *Kajian Distribusi Beras di Wilayah DKI Jakarta Melalui Pasar Induk Cipinang*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Masa, A. (2017, 17 April). Pemerintah akan tindak tegas peritel langgar harga eceran tertinggi. Diakses 5 Juli 2017, dari <http://www.antaraneews.com/berita/624596/pemerintah-akan-tindak-tegas-peritel-langgar-harga-eceran-tertinggi>
- Medianti, U. S. (2017, 17 Mei). APPSI: Aturan HET Bunuh Pelan-pelan Pedagang Pasar. Diakses 3 Juli 2017, dari <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2379283/appsi-aturan-het-bunuh-pelan-pelan-pedagang-pasar/>
- Melani, A. (2015, 12 Mei). Seskab Andi: Arahan Presiden Jokowi Tak Impor Beras. Diakses 4 Agustus 2017, dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2230753/seskab-andi-arahan-presiden-jokowi-tak-impor-beras>
- Mohamad, A. (2014, 13 Juni). Keran impor beras premium dibuka buat 13 perusahaan. Diakses 9 Agustus 2017, dari <https://www.merdeka.com/uang/keran-impor-beras-premium-dibuka-buat-13-perusahaan.html>
- Morton, F. M. S. (2001). The Problems of Price Control [Permasalahan Pengendalian Harga]. *The Cato Review of Business and Government*, 24(1). Diakses dari <https://www.cato.org/publications/commentary/problems-price-controls>
- Natalyn, E., & Nadlir, M. (2017, 9 Maret). Prediksi Bencana Alam Bertambah Tuntut Respons Siaga. Diakses 14 Juli 2017, dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/891747-prediksi-bencana-alam-bertambah-tuntut-respons-siaga>
- OECD, & FAO. (2015). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2015 [Prospek Pertanian 2015]*. Penerbit OECD. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en
- Patunru, A. A., & Basri, M. C. (2012). The Political Economy of Rice and Fuel Pricing in Indonesia [Ekonomi Politik Harga Beras dan Bahan Bakar di Indonesia]. Dalam A. Ananta & R. Barichello (Eds.), *Poverty and Global Recession in Southeast Asia [Kemiskinan dan Resesi Global di Asia Tenggara]*. Singapura: Penerbit ISEAS.
- Pradana, R. S. (2015, November 12). Dugaan Kartel Beras, KPPU: Pedagang Besar Berisiko Oligopoli. Diakses 9 Juni 2017, dari <http://industri.bisnis.com/read/20151112/12/491551/dugaan-kartel-beras-kppu-pedagang-besar-berisiko-oligopoli>
- Pengecer Beras di Pasar Tradisional Blok A dan Cipete di DKI Jakarta. (2017, 15 Juni). Wawancara pribadi dengan pengecer beras di pasar tradisional Blok A dan Cipete di DKI Jakarta.
- Ruauw, E. (2015). Kajian Distribusi Pangan Pokok Beras di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Agri Sosio Ekonomi*, 11(1), 58–68.
- Sagala, J. J., & Adri. (2017, 21 Maret). Wawancara pribadi dengan pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Saragih, A. E. (2014). *Analisis Sistem Pemasaran Beras Cihayang di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur*. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/70795/1/H14aes.pdf>

-
- Surjasa, D., Gumbira-Sa'id, E., Arifin, B., Sukardi, & Jie, F. (2013). Indonesian rice supply chain analysis and supplier selection model [Model seleksi pemasok dan analisis rantai pasokan beras Indonesia]. *International Journal of Information, Business and Management [Jurnal Internasional Informasi, Bisnis, dan Manajemen]*, 5(1), 198.
- Tambunan, T. (2008, September). Tata Niaga dan Pengendalian Harga Beras di Indonesia. Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Diakses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-3145-26092008.pdf>
- The Jakarta Post. (2017, 14 Juni). "Food sovereignty begins with farmers" welfare in mind' [Kedaulatan pangan dimulai dari memerhatikan kesejahteraan petani].
- The Straits Times. (2016, 24 Mei). Price of corn flour in Venezuela rises by 900 per cent [Harga tepung jagung di Venezuela melonjak hingga 900 persen]. Diakses dari <http://www.straitstimes.com/world/americas/price-of-corn-flour-in-venezuela-rises-by-900-per-cent>
- Vogel, R. J. (2004). Pharmaceutical pricing, price controls, and their effects on pharmaceutical sales and research and development expenditures in the European Union [Harga farmasi, pengendalian harga, dan efeknya terhadap penjualan farmasi dan pembelanjaan untuk penelitian dan pengembangan di Uni Eropa]. *Clinical Therapeutics [Terapeutik Klinis]*, 26(8), 1327–1340.
- Wilson, P. (2016, 19 Juni). Venezuela's Season of Starvation [Musim Kelaparan Venezuela]. Diakses dari <http://foreignpolicy.com/2016/06/19/venezuela-maduro-food-shortages-price-controls-political-unrest/>
- Wu, M. B. (2016). Issues in Venezuelan Monetary and Economic Reform [Isu-isu dalam Reformasi Ekonomi dan Moneter Venezuela]. *Studies in Applied Economics - Johns Hopkins University [Kajian Ekonomi Terapan - Universitas Johns Hopkins]*, (62). Diakses dari <http://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2017/04/Issues-in-Venezuelan-Monetary-and-Economic-Reform.pdf>
- X-Rates. (2017). X-Rates Converter Exchange Rates [X-Rates Konverter Valuta Asing]. Diakses 14 Februari 2017, dari <http://www.x-rates.com/average/?from=USD&to=IDR&amount=1&year=2010>
- x-rates.com. (2017). Currency Calculator [Kalkulator Valuta]. Diakses 15 Mei 2017, dari <http://x-rates.com/>

Lampiran

Analisis harga beras di Indonesia dan pasar internasional

A. Sumber Data dan Periode Data

Kami menganalisis hubungan antara logaritma (log) harga eceran lokal (yang mana sama dengan harga konsumen, **PD**) dari bahan-bahan pangan di Indonesia dalam rupiah per kilogram dan log harga internasional untuk bahan-bahan pangan yang sama (**PW**) dalam dolar AS per kilogram, sembari mengendalikan pergerakan dalam nilai tukar rupiah ke dolar AS (**ER**) juga dalam bentuk logaritma dan semua logaritma bersifat alamiah. Data rata-rata bulanan harga eceran (**PD**) didapatkan dari (Badan Pusat Statistik, 2017) (BPS) untuk periode Mei 2009 sampai Mei 2017 (97 observasi). Harga internasional didapatkan dari Database Bank Dunia (Bank Dunia, 2017) untuk periode yang sama. Nominal nilai tukar rupiah/dolar AS (**ER**) didapatkan dari kalkulator kurs nilai tukar (X-Rates, 2017) untuk periode yang sama.

Makalah ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode kuantitatif, kami menggunakan model koreksi kesalahan (*error correction models/ECMs*). ECM merupakan sebuah model yang dinamis, di mana pergerakan variabel dalam periode manapun memiliki hubungan dengan jarak periode sebelumnya yang dihasilkan dari keseimbangan jangka panjang (terkointegrasi). Selanjutnya, apabila terdapat kointegrasi terhadap serial data yang dianalisis, dan ECM tervalidasi, maka model ini akan mencakup spesifikasi dinamika yang lainnya – seperti mekanisme penyesuaian parsial.

Tahap pertama meliputi perkiraan hubungan jangka panjang antara harga lokal (**PD**) dengan harga internasional (**PW**), sambil mengendalikan nilai tukar valuta asing (**ER**) adalah dengan menggunakan metode dua-langkah (Engle & Granger, 1987), yang disebut uji ECM simetris. Berdasarkan pendekatan ini, apabila variabel-variabel yang terkointegrasi berasal dari urutan yang sama, maka variabel-variabel terintegrasi dari urutan satu (I(1)) dengan kointegrasi bentuk hubungan seperti pada persamaan (1):

$$PD_t = \alpha_0 + \beta_1 PW_t + \beta_2 ER_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

akan menghasilkan jangka stasioner (jangka kesalahan/residu) setelah memperkirakan persamaan ini dengan prosedur OLS (kuadrat terkecil/*ordinary least square*), di mana α dan β merupakan parameter estimasi. Apabila residu dari persamaan (1) stasioner, maka mekanisme koreksi kesalahan akan tercipta.

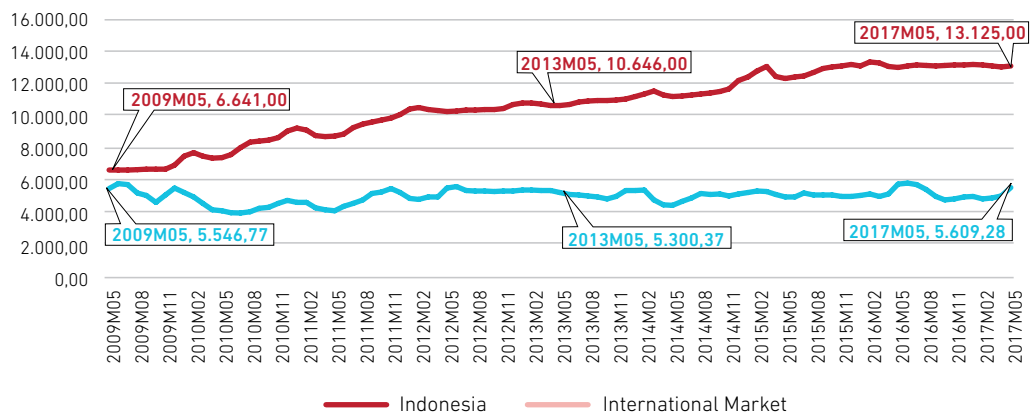
Kedua, ECM dibuat spesifik dengan menggunakan residu yang tertinggal dari regresi kointegrasi pada persamaan (1) sebagai jangka koreksi kesalahan dan menggunakan Δ sebagai indikator pembeda (membedakan berarti mengurangi dari) sebagaimana dalam persamaan (2):

$$\begin{aligned} \Delta PD_t = & \\ & \alpha_0 + \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta PW_t + \beta_3(L) \Delta PW_{t-1} + \beta_4 \Delta ER_t + \beta_5(L) \Delta ER_{t-1} + \\ & \beta_6 ECT_{t-1} + v_t \end{aligned} \quad (2)$$

B. Temuan-temuan Awal

Sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 8, harga bahan pangan lokal meningkat setiap bulan. Harga beras melonjak 98% dari Rp 6.641 per kilogram pada bulan Mei 2009 ke lebih dari Rp 13.125 per kilogram pada Mei 2017. Harga pangan dunia sedikit naik namun hampir stabil setiap bulannya. Harga beras dunia meningkat hanya sekitar 1,12% dari sekitar Rp 5.547 per kilogram pada Mei 2009 ke Rp 5.609 per kilogram pada Mei 2017. Kami menemukan bahwa pada Mei 2017, harga beras lokal hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga internasional.

Gambar 8
Tren Harga Beras di Indonesia dan di Pasar Internasional



Sumber diolah dari Badan Pusat Statistik (2009-2017), Bank Dunia (2009-2017), dan X-rates.com (2017)

Sebagaimana ditunjukkan pada hasil Persamaan 1 di bawah ini, dalam jangka panjang, perubahan harga beras dunia tidak mempengaruhi perubahan harga beras lokal.

$$P\widehat{Drice}_t = -0.313 + 0.101 P\widehat{Wrice}_t + 1.038^{***} ER_t$$

(***): menandakan signifikansi di tingkat keyakinan 1%

Dan sebagaimana ditunjukkan dalam hasil Persamaan 2 di bawah ini, dalam jangka pendek, peningkatan harga beras internasional sebesar 10% berdasarkan periode sebelumnya menyebabkan peningkatan seketika sebesar 1,09% di harga beras lokal periode saat ini, dengan hal-hal lainnya tetap sama (*ceteris paribus*), dan sebaliknya.

$$\Delta P\widehat{Drice}_t = 0.004^{**} + 0.417^{***} \Delta P\widehat{Drice}_{t-1} + 0.023 \Delta P\widehat{Wrice}_t + 0.109^{***} \Delta P\widehat{Wrice}_{t-1} + 0.191^{**} \Delta ER_t - 0.033^{**} ECT_{t-1}$$

(***): menandakan signifikansi di tingkat keyakinan 1%

(**): menandakan signifikansi di tingkat keyakinan 5%





ABOUT THE AUTHOR

Hizkia Respatiadi adalah Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Bidang risetnya meliputi sejumlah kebijakan publik yang terkait dengan fokus CIPS di bidang Perdagangan dan Kesejahteraan Masyarakat, termasuk kebijakan perdagangan di bidang agrikultur dan komoditas pangan, serta hak akses dan kepemilikan dan program hutan kemasyarakatan. Hizkia saat ini memimpin proyek 'Mewujudkan Harga Pangan yang Terjangkau bagi Keluarga Pra-Sejahtera' yang bertujuan untuk menurunkan harga bahan pokok di Indonesia dengan cara mereduksi hambatan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Sebelum berkarir bersama CIPS, Hizkia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri RI. Pengalaman internasionalnya meliputi penempatan di Kedutaan Besar RI di Zimbabwe, dan beberapa penugasan singkat di Inggris dan sejumlah negara lain di Asia dan Afrika.

Hana Nabila merupakan Peneliti Junior di Center for Indonesian Policy Studies. Bidang risetnya meliputi kebijakan publik yang terkait dengan fokus CIPS di bidang Perdagangan dan Kesejahteraan Masyarakat, termasuk kebijakan perdagangan di bidang agrikultur dan komoditas pangan.

Hana saat ini turut serta dalam proyek 'Mewujudkan Harga Pangan yang Terjangkau bagi Keluarga Pra-Sejahtera' dengan menciptakan indeks harga pangan yang dinamakan 'Indeks Bu RT' (Indeks Bulanan Rumah Tangga). Indeks ini mengamati seberapa besar perbedaan pengeluaran masyarakat Indonesia untuk membeli bahan pangan pokok dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat di negara tetangga. Perbandingan ini bertujuan memperlihatkan seberapa besar uang yang dapat dihemat oleh keluarga di Indonesia dalam hal membeli bahan pangan jika harganya semurah di negara tetangga.

Sebelum berkarier bersama CIPS, Hana bekerja sebagai Asisten Dosen di Universitas Padjadjaran untuk mata kuliah Ekonometrika dan Time Series selama dua tahun.

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_indonesia](https://twitter.com/cips_indonesia)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Grand Wijaya Center Blok G8 Lt. 3
Jalan Wijaya II
Jakarta Selatan, 12160
Indonesia
Tel: +62 21 27515135